

**UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA
MELALUI PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI
DI KENAGARIAN KOTO KACIAK KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

RUMAYANTI

NIM 2006/73363

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRAK

RUMAYANTI, 2006/73363 UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MELALUI PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI DI KENAGARIAN KOTO KACIAK KABUPATEN PASAMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak. Dengan fokus penelitian berhubungan dengan profil kemiskinan perempuan peserta program, kontribusi program kredit mikro nagari terhadap pemberdayaan perempuan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya untuk mengatasinya dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui program kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dilakukan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan yang dilakukan di kenagarian Koto Kaciak belum berjalan secara maksimal sehingga program kredit mikro nagari dalam hal meningkatkan pendapatan rumah tangga belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terjadi pengembalian tidak lancar atau kredit macet. Terlihat pula masih kurangnya kesadaran peserta program untuk menghadiri pelatihan maupun pertemuan yang diadakan oleh BPMPN dan Pokja kenagarian. Saran yang dapat direkomendasikan dalam pelaksanaan program kredit mikro nagari selanjutnya perlu diupayakan penjelasan dan pemahaman kepada peserta program dengan jalan pendekatan yang lebih persuasif dan menarik misalnya mengadakan pertemuan dalam kondisi dan suasana yang tidak begitu formal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Kredit Mikro Nagari Di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku ketua Jurusan ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D dan Ibu Dra. Hj.Aina selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yaitu: Dra. Hj. Heni Candra Gustina, Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed. M.Si, dan Junaidi Indrawadi, S.Pd. M.Pd yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Faridah, M.Pd sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
6. Dosen-dosen yang ada di Jurusan ISP UNP, beserta Bapak dan Ibu karyawan ISP UNP yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan disini.
7. Bapak dan Ibu yang ada di kantor Wali Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman yang telah membantu memberikan informasi dan data dalam penelitian.
8. Seluruh informan penelitian dan narasumber yang telah menyediakan waktu untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan data.
9. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena dalam segala sesuatu manusia tidak terlepas dari kekurangan itu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Walaupun masih jauh dari sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membaca dan menelaah skripsi ini.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Fokus Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis.....	11
1. Pemberdayaan Perempuan	11
a. Konsep Pemberdayaan Dalam Pembangunan.....	11
b. Pemberdayaan Perempuan dan Konsep Gender	13
c. Strategi Pemberdayaan Perempuan	17

d. Hubungan Kemiskinan dengan Kehidupan Perempuan.....	19
2. Kredit Mikro Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
a. Kredit Mikro Nagari	23
1) Pengertian Kredit Mikro Nagari.....	23
2) Tujuan Kredit Mikro Nagari	23
3) Sasaran Program Kredit Mikro Nagari	24
4) Strategi Program Kredit Mikro Nagari	25
b. Pemberdayaan Masyarakat	26
B. Kerangka Konseptual	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	32
1. Jenis dan Sumber Data	32
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
E. Teknik Uji Keabsahan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.....	38
1. Kondisi Geografis	38
2. Kondisi Demografis	39
3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
4. Kondisi Sosial Budaya	41
5. Pemerintahan Nagari Koto Kaciak	42

B. Hasil Penelitian.....	44
1. Profil Warga Miskin Peserta Program Kredit Mikro Nagari ..	46
a. Program Kredit Mikro Nagari di Nagari Koto Kaciak.....	54
b. Deskripsi Program Kredit Mikro Nagari.....	54
c. Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari	56
2. Kontribusi Kredit Mikro Nagari Terhadap Pemberdayaan Perempuan.....	62
3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari Untuk Pemberdayaan Perempuan	67
4. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari Untuk Pemberdayaan Perempuan	70
C. Analisis dan Pembahasan	71
1. Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kredit Mikro Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga	71
2. Kontribusi Program Kredit Mikro Nagari Bagi Perempuan Peserta Program	78
3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Program Kredit Mikro Nagari dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan	77
4. Upaya Mengatasi Kendala dalam Program Kredit Mikro Nagari untuk Pemberdayaan Perempuan.....	80

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Bonjol.....39
Tabel 2	Mata Pencarian Pokok Masyarakat di Kenagrian Koto Kaciak.....40
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kenagarian Koto Kaciak.....42
Tabel 4	Peserta Program Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak.....45
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Perempuan Peserta Program di Kenagarian Koto Kaciak.....46
Tabel 6	Status Rumah Hunian Perempuan Peserta Program di Kenagarian Koto Kaciak.....48
Tabel 7	Bahan Bakar Yang Digunakan Perempuan Peserta Program di Kenagarian Koto Kaciak.....49
Tabel 8	Sumber Air Yang Digunakan Perempuan Peserta Program di Kenagarian Koto Kaciak.....50

Tabel 9	Kepemilikan Ternak Perempuan Peserta Program di Kenagarian Koto Kaciak.....	51
Tabel 10	Penyaluran dan Pengembalian Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak.....	57
Tabel 11	Penyaluran dan Ketepatangunaan Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak.....	59
Tabel 12	Pendapatan Rata-Rata Peserta (Per Bulan) Sebelum dan Saat Program Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.....	61

DAFTAR GAMBAR

1. Model Kerangka Berfikir.....	29
2. Susunan Organisasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Perda Kabupaten Pasaman No. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.....	43
3. Organisasi Pokja Kenagarian.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 menyebutkan bahwa, “jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tercatat 477.200 jiwa tahun 2008 dan pada tahun 2009 tercatat 429.250 jiwa. Penduduk miskin sebanyak 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan diatas 10% diantaranya adalah Kabupaten Pasaman”.

Data BKKBN Kabupaten Pasaman tahun 2008 menyebutkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman pada tahun 2007 sebesar 18,10 persen, sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 21,09 persen, berarti jumlah keluarga miskin naik sebesar 2,99 persen dalam kurun waktu 1 tahun.

Dalam profil kenagarian Koto Kaciak tahun 2008 menyebutkan bahwa, pada tahun 2006 tercatat ada sekitar 477 keluarga miskin atau sebesar 18,7 persen. Pada tahun 2007 jumlah keluarga miskin tercatat sebesar 543 kepala keluarga atau sebesar 22,55 persen. Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 jumlah keluarga miskin di kenagarian Koto Kaciak bertambah 66 keluarga miskin, keluarga miskin ini tersebar di 6 (enam) jorong. Jumlah terbanyak ada di jorong koto tuo, yaitu sebanyak 115 keluarga.

Dalam rangka memperoleh data tentang keluarga miskin, BPS telah menentukan kriteria penentu keluarga miskin. Adapun kriteria yang ditetapkan BPS pada tahun 2007 adalah sebagai berikut (<http://bps.go.id>)

- 1) Luas lantai kurang dari 8 m² per kapita
- 2) Lantai tempat tinggal berupa tanah/bambu/kayu kualitas rendah/murahan
- 3) Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kelas rendah/murah/tembok tanpa plester
- 4) Tidak punya tempat buang air besar sendiri
- 5) Sumber air minum berupa sumur tak terlindungi/sungai/hujan
- 6) Sumber penerangan utama rumah tangga bukan listrik
- 7) Bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah
- 8) Tidak pernah mengonsumsi daging/ayam/susu dalam seminggu atau hanya seminggu sekali
- 9) Hanya mampu makan 1 atau 2 kali sehari
- 10) Tidak dapat membeli baju baru dalam setahun atau paling hanya 1 kali setahun
- 11) Tidak mampu berobat ke Puskesmas/ poliklinik
- 12) Tani dengan lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Tidak pernah sekolah, tidak tamat SD atau hanya tamat SD.
- 14) Tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- (emas, TV, ternak, dan lain).

Kriteria – kriteria yang ditetapkan oleh BPS tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu keluarga itu masuk dalam kategori keluarga miskin atau tidak. Sehingga program yang digulirkan pemerintah bisa tepat pada sasaran. Pada dasarnya program yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga keluarga miskin.

Kemiskinan perempuan di kenagarian Koto Kaciak disebabkan oleh faktor rendahnya pendidikan yaitu rata-rata perempuan di kenagarian Koto Kaciak hanya tamatan SD dan bahkan ada juga yang belum tamat

SD. Sehingga mereka tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas lain selain menjadi ibu rumah tangga. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di kenagarian Koto Kaciak tersebut sehingga berdampak pada pola pikir dan etos kerja mereka yang rendah karena perempuan di kenagarian Koto Kaciak tidak punya keahlian dan keterampilan khusus dalam rangka untuk membantu atau menambah pendapatan rumah tangganya. Dengan kondisi ketidakberdayaan tersebut, menjadikan perempuan di kenagarian Koto Kaciak selalu hidup tergantung pada suaminya.

Karena kurang berhasilnya program penanggulangan kemiskinan sebelumnya, mendorong pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mengeluarkan suatu kebijakan pemerintahan mengenai penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Luankali (2007:2) adalah, “Kebijakan publik sebagai keseluruhan rumusan kegiatan yang berisikan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai”.

Berkaitan dengan hal di atas, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan mengenai program penanggulangan kemiskinan berdasarkan azas Dekonsentrasi. Hal ini didasari oleh UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8 yang menetapkan bahwa: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Maka berpijak dari azas dekonsentrasi itulah, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2009 yaitu Program Kredit Mikro Nagari. Hal ini dimuat pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 65/V/Sosbud/Bappeda/2009 tentang Bantuan Kredit Mikro Nagari.

Program ini berupa penyaluran dana dari pemerintah provinsi kepada kelurahan/nagari. Merupakan bantuan kredit modal usaha dalam rangka pengembangan usaha keluarga miskin dan sebagai modal bagi masyarakat untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Adapun maksud penyaluran Kredit Mikro Nagari ini adalah untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat kelurahan/nagari agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyaluran Kredit Mikro Nagari ini adalah meningkatkan pendapatan Rumah Tangga miskin melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, Kenagarian Koto Kaciak adalah salah satu nagari yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan berupa Kredit Mikro Nagari. Bupati Pasaman Yusuf Lubis pada tanggal 24 Januari 2010 dalam acara pertemuan di Kantor Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari menegaskan bahwa pemberdayaan dalam konteks ini adalah memberikan bantuan modal usaha

tetapi diiringi dengan pertanggung jawaban produksi melalui proses perilaku positif yaitu jujur, produktif, kerja keras, bertanggung jawab dan memahami arti kerjasama usaha.

Salah satu tujuan program kredit mikro nagari adalah pemberdayaan pada perempuan yaitu membentuk perempuan yang mandiri dalam meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga. Sebagaimana halnya tujuan dari program tersebut, pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Nagari Koto Kaciak adalah berupa bantuan modal kepada perempuan yang telah mempunyai usaha misalnya usaha dagang dan jahit yang dikelola oleh perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan perempuan sebagai manusia yang mandiri yang mampu berusaha sendiri dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat menambah pendapatan dalam rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman pada tahun 2009 mengalokasikan dana sebesar 300 Juta Rupiah untuk tiap-tiap kenagarian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu permodalan usaha masyarakat, terutama yang dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu. Bantuan kredit ini, diberikan kepada kelompok usaha kecil tingkat rumah tangga miskin (RTM) misalnya usaha dagang dan jahit.

Kegiatan pemberdayaan perempuan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang kini dialami, namun juga bersifat strategis karena kegiatan ini disiapkan landasan berupa intitusi perempuan yang menguat bagi perkembagannya di masa mendatang. Pada akhirnya upaya

penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh Perempuan secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun dalam pelaksanaan program ini banyak mengalami berbagai macam kendala. Baik yang berasal dari pelaksana program maupun dari peserta program. Misalkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada daerah sasaran program yang mengakibatkan program ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan, masih banyak masyarakat yang berkategori miskin walaupun telah banyak program penanggulangan kemiskinan dijalankan, kendala lain yang dihadapi adalah terjadi penyimpangan penggunaan dana yang diberikan, terbatasnya dana yang tersedia dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan perempuan

Kemudian untuk konteks kapasitas masyarakat, kemampuan masyarakat khususnya perempuan dalam mengelola usahanya tidak bertambah. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan perempuan mengenai sistem pembukuan yang baik, sehingga modal yang ada tidak dapat meningkat.

Dari uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik memilih judul **“Pemberdayaan Perempuan dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga melalui Program Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang mampu mengelola usaha masih rendah.
- 2) Banyaknya masyarakat yang masih dikategorikan miskin meskipun telah banyaknya program pemberdayaan yang diluncurkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengembangan terhadap usahanya.
- 4) Efektifitas program masih rendah karena banyak mengalami kendala dalam hal melaksanakan.
- 5) Terjadinya penyimpangan penggunaan dana yang diberikan.
- 6) Terbatasnya dana yang tersedia untuk diberikan pada peserta program
- 7) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari pemberdayaan perempuan

2. Pembatasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program kredit mikro nagari, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bidang usaha dagang dan jahit yang ada di

Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman sebagai jenis usaha yang kebanyakan dikelola oleh kaum perempuan. Penulis memilih pemberdayaan perempuan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pemberdayaan perempuan padahal di Kenagarian Koto Kaciak jumlah penduduknya lebih banyak adalah perempuan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kemiskinan perempuan di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimanakah kontribusi program Kredit Mikro Nagari terhadap pemberdayaan perempuan di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman?
3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan program kredit mikro nagari untuk pemberdayaan perempuan di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus dari penelitian ini adalah menganalisis tentang profil kemiskinan perempuan di kenagarian Koto Kaciak, menganalisis bagaimana kontribusi program Kredit Mikro Nagari terhadap pemberdayaan perempuan di Kenagarian

Koto Kaciak Kabupaten Pasaman dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat, Serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan melalui program Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan profil kemiskinan pada perempuan di kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.
2. Untuk menggali kontribusi program Kredit Mikro Nagari terhadap pemberdayaan perempuan di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui program Kredit Mikro Nagari di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan khasanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam hal program Kredit Mikro Nagari pada pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kenagarian Koto Kaciak.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian yang dapat membuka wawasan dan menarik untuk terus digali dan dikembangkan, sehingga pemberdayaan perempuan sesungguhnya benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan dan pembangunan di Kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pemberdayaan Perempuan

a) Konsep Pemberdayaan dalam Pembangunan

Pemberdayaan menurut Shardlow dalam Roesmidi dan Risyanti (2006:3), "Pemberdayaan adalah membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka".

Menurut Edi Suharto (2005:58) mengatakan bahwa, "Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka".

I Nyoman Sumaryadi (2005:96) mengatakan bahwa, “ kata pemberdayaan mengandung ide bahwa orang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kepuasan yang lebih besar”.

Sedangkan menurut Roesmidi dan Risyanti (2006:1) mengatakan bahwa, “Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan”.

Pemberdayaan menurut Karl dalam Sugiarti (2003:193) dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses atas sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Gambaran analisis kelima dimensi tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dimensi kesejahteraan, secara sederhana variable tersebut dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.;
2. Dimensi akses atas sumber daya, variabel tersebut dapat diketahui dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lainnya;
3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis, variabel ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya

kesenjangan sosial yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya bisa diubah;

4. Dimensi partisipasi, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan sosial dalam partisipasi yang ditunjuk oleh terwakili atau tidaknya masyarakat dalam wadah atau lembaga-lembaga yang terkesan elit;
5. Dimensi kontrol, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antar anggota masyarakat terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Apabila kelima dimensi tersebut telah terpenuhi oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah berdaya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya sehingga mampu membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Konsep Gender

Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam

masyarakat. Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan atau berperspektif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. (Ferdhinal Asful dkk, 2009:21)

Ropi Jamhari Ismatu (2003:29) mengatakan bahwa, “Perempuan dalam Islam mendapatkan tempat yang mulia, tidak seperti yang dituduhkan oleh sebahagian masyarakat bahwa islam hanya menempatkan perempuan dalam bahasa sebagai unsur subordinat dalam kehidupan masyarakat”.

Sedangkan menurut Ruth Dixon Muller dalam Yerli Asir (2008:15) pada kliping surat kabar tahun 2008 menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai kapasitas perempuan baik sebagai individu/ kelompok untuk melawan kewajiban tidak rasional yang mengontrol prilaku atau penolakan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini, merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan nasional, pembangunan demokratisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan. Istilah pemberdayaan perempuan bukan hanya mengandung makna mengembangkan potensi kaum perempuan, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kemampuan bertindak untuk mengubah keadaan menuju ke arah yang lebih baik”.

Roesmidi dan Risyanti (2006:111) mengatakan bahwa, “Pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut, yaitu perjuangan perempuan”.

Konsep gender menurut Roesmidi dan Risyanti (2006:114), “merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat”. Kemudian dijelaskannya lagi, konsep ini merujuk pada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan dan persepsi, baik tentang perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dengan demikian penggambaran perempuan dan laki-laki berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan aspek biologis saja. Dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan sifat-sifat tersebut dapat ditukarkan, maka hasil tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan bukan kodrat.

Dalam proses pemberdayaan perempuan terdapat permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan yang merupakan masalah khas gender, dan berasal dari fakta bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peranan dan kebutuhan yang

berbeda sehingga menghadapi peranan yang berbeda pula. Oleh karena itu, tidak diasumsikan bahwa perempuan secara otomatis memperoleh keuntungan dari upaya yang melibatkan masyarakat miskin baik dalam rencana maupun implementasi proyek pengentasan kemiskinan

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti proses pemiskinan ekonomi, diskriminasi dan kekerasan.

Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Syarif Makmur (2008:35) yaitu :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu harmonis antara sector dan sub sektor pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan politik, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan

- 3) Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarus utamakan gender di segala bidang kehidupan

Human Capital Theory, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut Roesmidi dan Risyanti (2006:111) pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Definisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial”.

c) Strategi Pemberdayaan Perempuan

Menurut Tjokrowinoto dalam penelitian Santi Kustiani (2005:19), pemberdayaan di dalam proses pembangunan harus memuat dua strategi dasar yang memadukan dua tujuan sekaligus, yaitu:

1. Pertumbuhan

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai mekarnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam semua bidang (bidang politik, pendidikan, hukum, kesempatan kerja, media massa, inovasi teknologi dan lain-lain).

2. Pemerataan

Pemerataan dapat diukur dengan meratanya asset dan akses kemajuan seluruh rakyat dimana hasil kegiatan pembangunan pun dengan demikian bisa lebih diharapkan terdistribusi ke seluruh desa dan kampung-kampung Indonesia.

Dalam arus konseptual, arah pemberdayaan masyarakat hanya efektif apabila ditopang oleh tiga hal yaitu (Santi Kustiani, 2005:20) :

1. Pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan mereka;
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan hidup; dan
3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari satu tingkat yang kurang baik ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok masyarakat menjadi kurang berdaya (*depowerment*), sehingga

masyarakat yang tadinya kurang berdaya dapat menjadi lebih berdaya setelah melalui serangkaian proses. Pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses merupakan suatu proses yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang kelompok masyarakat/ perempuan itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak terpaku pada satu program saja. Pemberdayaan sebagai *on-going* merupakan proses pemberdayaan individu yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Proses pemberdayaan akan terus berlangsung selama masyarakat itu masih ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

d) Hubungan kemiskinan dengan kehidupan perempuan

Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun masyarakat juga miskin dan cenderung terus miskin apabila mereka

tidak diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Dalam konteks upaya penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan dari *top down* menjadi *bottom up*, dengan memberi peran masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Proses *bottom up* akan memberi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam merencanakan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan.

Kondisi ini akan terlihat jika menempatkan kaum miskin dalam posisi terhormat, memberi ruang pada mereka untuk mengembangkan partisipasi dan prakarsa lokal, sehingga konsep kaum miskin sebagai penerima manfaat proyek tidak terlalu relevan dibicarakan dalam konsep pembangunan manusia.

Dalam praktek pembangunan selama ini di Indonesia lebih menempatkan paradigma pembangunan ekonomi dengan pendekatan produktivitas yang banyak menimbulkan disparitas pendapatan yang hanya membuat kaya segelintir orang saja. Model pembangunan masa lalu, ternyata perlu ada upaya untuk menggeser kepada "paradigma baru" agar pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat (*social development*) yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Model pendekatan ini bercirikan desentralisasi yang lebih bersifat *bottom-up* dengan strategi

pemenuhan kebutuhan masyarakat bawah (*grassroots*). Upaya ini perlu terus dicoba dan ditunjukkan kepada masyarakat. Salah satu upaya telah dicoba, desentralisasi dengan semangat Otonomi Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai peraturan pemerintah (PP) yang harus disesuaikan untuk membangun bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Dari setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan (*top-down*), ternyata tidak semuanya sesuai dengan kaedah dan hakikat untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi selama ini belum juga mampu menjawab persoalan membangun kesejahteraan rakyat di Indonesia. Untuk menjawab satu persoalan dalam praktek pembangunan, seperti sentra bisnis UKM agar berorientasi untuk mensejahterakan rakyat, maka secara saintifik dan metodologis diperlukan upaya untuk merumuskan paradigma dan pendekatan baru agar dapat diimplementasikan, diuji dan bahkan harus diakui oleh berbagai pihak yang berkompeten.

Untuk itu, keberpihakan terhadap masyarakat dalam arah kebijakan pembangunan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disampaikan Sri Mulyani (dalam Soetrisno. R. (2001:2)) menegaskan bahwa kebijakan yang mampu menjawab masalah kemiskinan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan adalah dengan membuka kemungkinan golongan miskin untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan tersebut maka upaya untuk

meningkatkan akses penduduk miskin agar dapat memperoleh, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya yang tersedia.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau perempuan sebagai pusat pembangunan. Menurut Sumodiningrat. G. (1997:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat

(instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Kredit Mikro Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Kredit Mikro Nagari

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sumbar (2008) mengatakan bahwa, “Kredit Mikro Nagari adalah dana yang disediakan oleh pemerintah propinsi untuk pemerintah daerah kabupaten pasaman yang dipinjamkan kepada masyarakat yang mempunyai usaha mandiri dari keluarga miskin dalam rangka penguatan atau pengembangan modal usaha. Pinjaman ini wajib dikembalikan kepada pengelola selama jangka waktu yang telah ditentukan”.

Adapun tujuan penerapan program kredit mikro nagari adalah:

- 1) Terciptanya perilaku positif bagi masyarakat miskin dan stakeholder terkait
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial ekonomi
- 3) Terselenggaranya sisten perencanaan dan pengawasan partisipatif
- 4) Terwujudnya sinergitas program antara Pemprov, Kabupaten/Kota dan masyarakat
- 5) Terbangunnya kapasitas kelurahan/nagari sebagai basis ketahanan masyarakat

Sasaran dari program Kredit Mikro Nagari pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- 1) Keluarga miskin yang produktif atau yang telah punya usaha
- 2) Kelurahan/nagari yang ada di kabupaten pasaman
- 3) Pemberdayaan institusi masyarakat kelurahan/nagari
- 4) Usaha perempuan yang ada di kelurahan/nagari

Kredit Mikro Nagari disalurkan kepada Daerah Kabupaten/Kota, nagari/kelurahan dan kelompok masyarakat miskin dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan KUA
 - b. Penyediaan dana pendampingan sebesar dana yang dialokasikan oleh provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota
 - c. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota telah terbentuk dan melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Kriteria Nagari/Kelurahan
 - a. Berdasarkan proporsi atau jumlah RTM (KK) yang ditetapkan BPS
 - b. Bukan nagari/kelurahan yang beresiko tinggi (perbankan)
 - c. Bukan nagari/kelurahan dalam konflik internal

- d. Mempunyai minimal 1 (satu) usaha perempuan pada masing-masing nagari atau kelurahan
- e. Penentuan akhir nagari/kelurahan terpilih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan Kabupaten/Kota

3. Kriteria Individu

- a. Individu berasal dari keluarga miskin, sebagaimana tercantum dalam data rumah tangga miskin BPS
- b. Prioritas bagi individu yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang banyak
- c. Anggota yang sudah ada usaha sendiri
- d. Persetujuan dari lembaga/institusi/kekerabatan yang ada
- e. Belum pernah mendapat tambahan modal dari program penyediaan kredit lainnya

Strategi yang digunakan dalam penerapan Kredit Mikro Nagari dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumbar adalah :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan, tumbuh dan berkembangnya prakarsa, keterbukaan, akuntabilitas/ pertanggungjawaban
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat kemampuan mengelola sumber daya sosial dan ekonomi

- c. Peningkatan peran dan fungsi lembaga masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan di kenagarian
- d. Perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan modal (murah dan mudah) dengan jaminan sosial dari masyarakat
- e. Peningkatan sinergitas program pembangunan dalam konteks nagari/ kelurahan
- f. Pembentukan dan pengembangan lembaga pengelola keuangan di tingkat nagari/ kelurahan

b. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu penyebab ketidakberdayaan masyarakat adalah tidak terjangkaunya oleh mereka sistem pendidikan persekolahan dan kurang berkembangnya kegiatan pendidikan luar sekolah yang ada diantara mereka. Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiran program-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat. Untuk itu menurut Kindervater dalam Anwar (2007:5) bahwa, “pemberdayaan melalui pendidikan luar sekolah memfokuskan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok dan menekankan pada proses objektif, seperti penguasaan, pengaturan dan keterampilan”.

Ada enam jenis program pendidikan berkelanjutan yang dapat memberdayakan perempuan, yaitu : (1) program pasca keaksaraan, (2) program pendidikan kesetaraan, (3) program peningkatan pendapatan,

(4) program peningkatan mutu hidup, (5) program pengembangan minat individu, (6) program yang berorientasi pada masa depan. Oleh Appeal dalam Anwar (2007: 98)

“Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan berbagai pendekatan, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat”. yang dikemukakan Anwar (2007:1). Kemudian memberdayakan masyarakat upaya memperkuat unsur-unsur keberadaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat, oleh Kartasasmita dalam Anwar (2007:1)

Adapun model manajemen pemberdayaan perempuan (MPP) oleh Anwar (2007:2), “melalui suatu proses perubahan sosial dalam bentuk pembelajaran keterampilan (*life-skill*) berbasis sosial budaya. Melalui model ini berhasil memberikan penyadaran akan eksistensi diri perempuan akibat proses *life-skill*, sehingga aktivitas produktif perempuan dapat berlangsung secara swadaya”.

Proses pengorganisasian dan pengembangan ekonomi menurut Anwar (2007:102) dapat dilakukan melalui program pendidikan luar sekolah yang secara umum bertujuan :

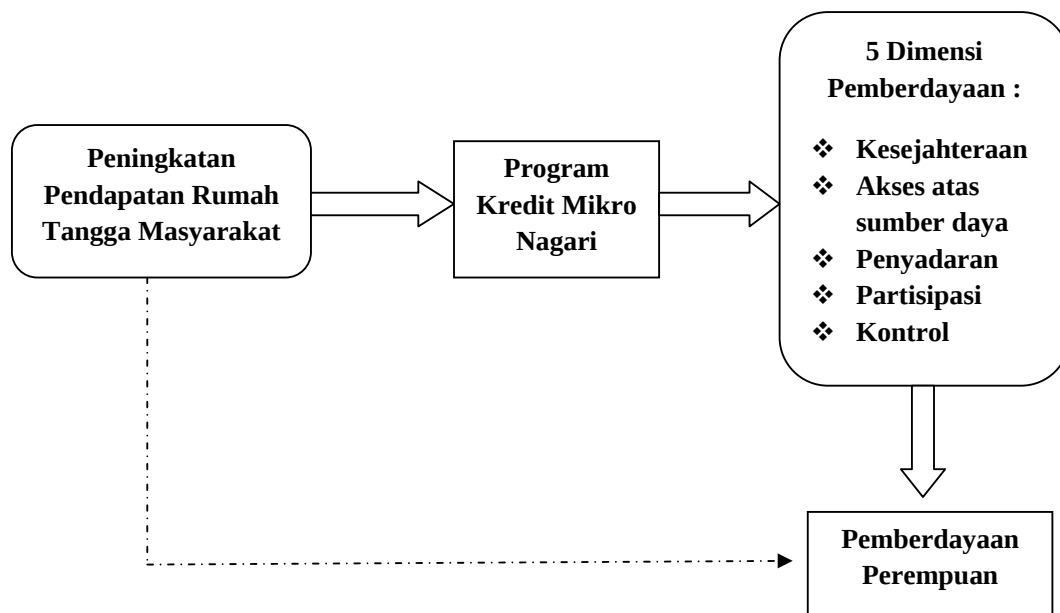
- (1) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya,
- (2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi,
- (3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Dari hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan sangat berhubungan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui pengembangan industri kecil dalam hal industri yang dikelola oleh perempuan. Dan untuk mengembangkan industri tersebut diperlukan modal. Kemudian, penerapan program kredit mikro nagari merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang produktif sehingga perempuan dapat mengembangkan usaha mereka itu untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

B. Kerangka Konseptual

Salah satu sasaran penerapan program kredit mikro nagari adalah terbentuknya usaha kelompok perempuan di kenagarian sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan. hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar terhindar dari kemiskinan. Suatu pemberdayaan mempunyai lima komponen utama yaitu kesejahteraan, akses atas sumber daya, penyadaran, partisipasi dan kontrol.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut :



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kemiskinan perempuan di nagari Koto Kaciak secara umum disebabkan oleh kondisi struktural yaitu terbatasnya akses dan kepemilikan terhadap berbagai sumber daya. Walaupun pelaksanaan kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak telah sesuai dengan prosedurnya namun belum mampu untuk meningkatkan pendapatan perempuan. hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan peserta program sehingga mereka tidak punya keterampilan dan keahlian khusus untuk mengelola bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah setempat dengan baik.
2. Kontribusi kredit mikro nagari untuk pemberdayaan perempuan sudah memperlihatkan sedikit perubahan pada kehidupan mereka. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau perempuan peserta program dengan adanya bantuan kredit mikro nagari yaitu sekurang-kurangnya sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada sebagian masyarakat yang belum merasakan manfaat dari bantuan kredit mikro nagari. Hal ini terjadi karena masyarakat atau perempuan peserta program tidak mampu

mengembangkan potensi sumber daya dan tidak mempunyai keahlian maupun keterampilan sehingga tidak produktif.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak, antara lain:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan di kantor wali Nagari yang membahas mengenai perkembangan usaha setelah adanya program kredit mikro nagari.
- b. Masih adanya masyarakat yang belum punya kartu identitas diri yaitu KTP sehingga menyulitkan bagi petugas pelaksana untuk mendapatkan jumlah data masyarakat yang kurang mampu

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu:

- a. Di bidang peningkatan sumber daya, kelompok kerja di kenagarian Koto Kaciak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga terkait mengenai penjelasan program *Extention* kredit mikro nagari atau program lanjutan kredit mikro nagari paradigma baru.
- b. Di bidang pembinaan, BPMPN dan Pokja kenagarian melaksanakan pertemuan dengan perempuan peserta program untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh perempuan peserta program.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui program kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak Kabupaten Pasaman belum maksimal. Untuk memaksimalkan hal tersebut, penulis menyarankan untuk memperbaiki pelaksanaan program dengan cara:

1. Bagi pelaksana yaitu BPMPN, hendaknya selalu berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar dan tepat kepada perempuan peserta program, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan penerima bantuan. Bagi pokja program kredit mikro nagari di kenagarian Koto Kaciak perlu di upayakan pendekatan persuasive dan menarik kepada perempuan peserta program yang ada, misalnya pertemuan yang dikondisikan dengan tidak begitu formal namun tetap tepat pada sasaran yang dituju.
2. Bagi tim pendampingan, agar lebih memperhatikan lagi permasalahan perempuan peserta program dan memberikan masukan-masukan yang bisa membantu mereka dalam hal penanganan bantuan kredit mikro nagari agar dana yang tersedia dipergunakan sebagaimana mestinya kemudian lebih sering melakukan pendampingan pada peserta program, apalagi peserta yang melakukan pembayaran tidak lancar
3. Bagi perempuan peserta program, hendaknya tertib identitas diri karena dengan begitu dapat mempermudah untuk didata dan mendapat bantuan program, ikut serta untuk menghadiri dan mengikuti

pertemuan maupun pelatihan yang dilakukan baik oleh pokja kenagarian maupun oleh BPMPN sehingga pemahaman dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan yang diperoleh maksimal yang akhirnya bantuan tersebut mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi Dan Metode Logis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali
- Edi,Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- I Nyoman, Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Public Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press
- Roesmidi dan Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Ropi, Jamhari Ismatu. 2003. *Citra Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soetrisno. R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sugiarti. 2003. *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM
- Sugiyono. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumodiningrat. G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Syarif Makmur.2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada